



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PROGRAM RUMAH BUMN

Rasbin

Analisis Legislatif Ahli Madya
rasbin@dpr.go.id

Muhammad Zakik Abidin

Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.abidin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah Program Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Taspen (Persero) merupakan salah satu BUMN yang mempunyai komitmen kuat dalam program ini. Program Rumah BUMN merupakan platform kolaborasi bagi BUMN, UMKM, pemerintah, perusahaan *start-up*, dan komunitas untuk mengembangkan ekosistem digital. Rumah BUMN memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang ekonomi digital, seperti fasilitas *co-working space* yang mendukung inkubasi bisnis. Rumah BUMN juga berperan dalam penanggulangan bencana melalui satuan tugas (satgas) bencana, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta berfungsi sebagai pusat literasi dan informasi bagi pelaku UMKM. Sejak 2017, sudah didirikan Rumah BUMN sebanyak 245 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Bangka Belitung, Yogyakarta, Balikpapan, Sumatera Barat, Aceh, dan Jakarta.

Isu utama dalam pengembangan UMKM yang diangkat oleh Rumah BUMN berkisar pada bagaimana UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional, serta kontribusi program ini terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, kesenjangan digital di kalangan UMKM. Contohnya, Rumah BUMN telah mendorong 829 UMKM di Provinsi Bangka Belitung untuk beralih ke platform digital seperti *e-commerce* dan media sosial. Namun, masih ada tantangan besar terkait kesenjangan digital di kalangan UMKM. Kesenjangan ini mencakup kurangnya literasi digital, keterbatasan akses ke infrastruktur digital yang memadai, serta kemampuan yang terbatas dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional bisnis. Tantangan ini harus dicari solusinya, agar tidak menjadi hambatan bagi UMKM dalam bersaing di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat memanfaatkan peluang digital secara maksimal.

Kedua, kurasi produk dan standarisasi untuk pasar internasional. Meski banyak UMKM yang memiliki produk berkualitas, masih banyak UMKM menghadapi kendala dalam hal standarisasi dan kualitas produk yang dapat diterima di pasar global. Kurasi produk menjadi kunci untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang diakui secara internasional, baik dari segi kualitas, kemasan, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kurasi juga penting untuk memastikan bahwa produk UMKM dapat memenuhi selera dan permintaan pasar internasional yang beragam. Tanpa upaya kurasi yang efektif, UMKM akan sulit untuk menembus pasar global.

Ketiga, tantangan dalam membangun ekosistem kolaboratif. Rumah BUMN bertujuan untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi UMKM. Kolaborasi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan program tumpang tindih, alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan

kurangnya dukungan yang tepat sasaran bagi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta penentuan tujuan dan sasaran yang jelas dalam setiap inisiatif yang dilakukan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan kolaborasi yang dilakukan juga penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan.

Keempat, keberlanjutan program dan dampak jangka panjang. Keberlanjutan program Rumah BUMN juga menjadi isu penting dalam pengembangan UMKM. Meskipun program ini telah berjalan sejak 2017, tetapi masih perlu dipertanyakan seberapa jauh program ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Keberlanjutan tidak hanya terkait dengan pendanaan dan dukungan dari BUMN, tetapi juga dengan kemampuan UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara mandiri setelah mendapatkan bantuan dari program ini. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi keberlanjutan yang memungkinkan UMKM dapat menjadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada dukungan dari program Rumah BUMN.

Atensi DPR

Program Rumah BUMN merupakan langkah positif dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, berbagai isu dan tantangan perlu diatasi untuk memastikan bahwa program ini benar-benar dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengatasi kesenjangan digital, memastikan kurasi produk yang efektif, membangun ekosistem kolaboratif yang solid, dan merancang strategi keberlanjutan yang baik, program Rumah BUMN berpotensi menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengembangan UMKM. Terkait hal tersebut, DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN untuk memastikan Program Rumah BUMN berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Sumber

cnbcindonesia.com, 12 Agustus 2024;
kompas.com, 12 Agustus 2024;
sindonews.com, 12 Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.